Berdasarkan pasal 35 (2) UU No. 1/1974 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami/isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian suami/isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya i. c. penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

PUTUSAN
Reg. No. 1459 K/Pdt/1986

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan berikut dalam perkara :

I. Liem Tek Bie alias Wilhelmus,

II. Liem Heng Tjan alias John Herry, keduanya bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 28 Jayapura, pemohon-pemohon kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat I, II — Terbanding;

melawan :

Ny. Hilda Pontoh, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Murahpuri K.I. Kotaraja Jayapura, termohon kasasi dahulu Penggugat — Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat seka-

rang pemohon-pemohon kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 27 Mei 1972 Penggugat asli telah kawin sah secara Agama Islam dengan Tergugat asli I dan dalam perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :

1. Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri, umur 11 tahun,
2. Siti Rokaya, umur 7 tahun,

kedua orang anak tersebut turut bersama-sama dengan Penggugat asli; bahwa Tergugat asli I tidak mempunyai pekerjaan tetap, antara Penggugat asli dan Tergugat asli I sering cekcok, dan pada tanggal 28 Agustus 1984 perkawinan antara Penggugat asli dan Tergugat asli I pecah karena perceraian;

bahwa pada tanggal 10 Desember 1984 Penggugat asli dan Tergugat asli I rujuk, tetapi kemudian cekcok lagi dan Tergugat asli I meninggalkan rumah dan tinggal dengan anaknya dari isteri pertama (Tergugat asli II);

bahwa pada tahun 1962 Tergugat asli I dan Penggugat asli berhasil menempati sebuah rumah peninggalan Cina Asing yang melarikan diri ke Hongkong;

bahwa berkat perjuangan Penggugat asli menghadap Pejabat-pejabat, Tergugat asli I yang tadinya hanya memegang surat kuasa, atas rumah dan tanah yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura berhasil di atas namakan Tergugat asli I;

bahwa kemudian Tergugat asli I telah menghibahkan semua tanah dan rumah tersebut kepada anak dari isteri pertama (Tergugat asli II) secara diam-diam pada tanggal 10 Pebruari 1984 No. 594.4/01/1984 di hadapan Camat Kecamatan Jayapura Utara, sekarang telah disertifikatkan atas nama Tergugat asli II (tanggal 30 Maret 1984);

bahwa tanah tersebut luasnya 524 M2 dan batas-batasnya seperti terperinci dalam surat gugatan;

bahwa sekarang bangunan di atas tanah sengketa telah dibongkar dan dibangun dengan bangunan baru bertingkat terdiri atas 8 (delapan) pintu;

bahwa Penggugat asli sebagai isteri sah dari Tergugat asli I dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya, Penggugat asli menuntut hak Penggugat asli beserta anak-anak yaitu 2 (dua) pintu dari bangunan yang dibangun Tergugat asli I dan Tergugat asli II, atau kalau diganti dengan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

bahwa penghibahan oleh Tergugat asli I kepada Tergugat asli II

telah mengurangi hak Penggugat asli dan anak-anak, sehingga bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat asli mohon hibah tersebut dibatalkan;

bahwa selama perkawinan dari bulan Mei 1972 sampai dengan bulan Juli 1985 (13 tahun 2 bulan), Tergugat asli I tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat asli;

bahwa Penggugat asli menuntut nafkah sebesar Rp 300.000,— per bulan, sehingga semua berjumlah 13 tahun, 2 bulan = 158 bulan x Rp 300.000,— sama dengan Rp 47.400.000,— (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

bahwa untuk jaminan gugatan, Penggugat asli mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah sengketa;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dan atau kuasa dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan apapun juga yang langsung atau tidak langsung menurut sifatnya merupakan pelaksanaan lanjutan pembongkaran rumah dan atau bangunan-bangunan baru di atas tanah seluas 524 M2 terletak di Jalan A. Yani Jayapura (di muka Toko Bintang Mas);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah) per hari atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya dalam keputusan ini;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Provisionil tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri janda sah dari Tergugat I dan kedua orang anak nama Liem Hang Pang alias Sjamsul Bahri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat I;

4. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan delapan pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan II dan pensertifikatan tanah atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan perlu dinyatakan batal;
6. Menyatakan betul bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dari 27 Mei 1972 sampai 15 Juli 1985 Tergugat I tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas adalah sah menurut hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan pada Penggugat dan 2 orang anaknya yang masih di bawah umur, 2 pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas, kalau dibayar dengan uang Tergugat I harus membayar sebesar Rp 350.000.000,— (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang nafkah sebesar Rp 47.400.000,— (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama membayar uang ongkos semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa objek perkara ini menyangkut pihak lain yaitu adanya perikatan jual-beli antara Tergugat II dengan Tuan Tio Tjin Jin alias Tajuuddin Hanitio, akta No. 19 tanggal 9 Juni 1984 dari Wakil Notaris Sementara di Jayapura (bukti P.1) dan bukti P.2;

bahwa objek perkara menyangkut pula kepentingan dari 7 orang saudara-saudara sekandung Tergugat II, yaitu akta hibah No. 30 tanggal 24 Maret 1981 (P.3) dari Tergugat I kepada kedua orang anak Tergugat I dan Penggugat;

bahwa adalah suatu keharusan, bahwa suatu gugatan harus ditujukan kepada semua pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan terhadap objek perkara, sedangkan ternyata bahwa gugatan Penggugat

sekarang ini tidak meliputi semua pihak sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri memberikan putusan dalam tingkat eksepsi mengambil keputusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Oktober 1985 No. 37/Pdt/G/1985/PN.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat;

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Provisionil :

Menyatakan gugatan provisionil dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan benar Penggugat adalah janda Tergugat I dan dua orang anak yaitu : Liem Hang Pang Alias, Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur benar anak Penggugat dengan Tergugat I;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menyatakan sita jaminan tanggal 22 Juli 1985 No. 37/B.A.Pdt.G/1985.Pn.Jpr., tidak berharga;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga keputusan ini diucapkan berjumlah Rp 22.000,— (dua puluh dua ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusannya tanggal 28 Nopember 1985 No. 38/Pdt/1985/PT.Jpr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

— Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding;

— Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr., dengan mengadakan perbaikan beberapa diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 No. 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr.;

Dalam Gugatan Provisionil :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 No. 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr.;

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 No.37/Pdt.G/1985/PN.Jpr., dengan perbaikan mengenai diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan benar Penggugat adalah Janda Tergugat I dan 2 (dua) orang anak yaitu : Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur anak Penggugat dan Tergugat I;

- Menyatakan, bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan 8 (delapan) pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;

- Menyatakan bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demikian juga sertifikat atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan;

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan, sah dan menurut hukum;

- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2 (dua) pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas Jayapura;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos perkara baik di tingkat peradilan pertama maupun di tingkat banding sebesar Rp 1.900,— (seribu sembilan ratus rupiah);

- Menolak petitum gugatan selainnya;

bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 4 Pebruari 1986 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Tergugat I, II — Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Pebruari 1986 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37/Pdt/C/1985/PN.Jpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Pebruari 1986;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-Pembanding yang pada tanggal 24 Pebruari 1986 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat

I-II — Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Maret 1986;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya seperti tersebut di atas sangat keliru dan tidak tepat karena tidak mempertimbangkan secara benar mengenai objek perkara;
2. Bahwa dari bukti-bukti pemohon-pemohon kasasi I dan mereka telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 4 dipertimbangkan bahwa hibah tanah sengketa pada Tergugat II adalah tanggal 11 Mei 1973;

Menimbang, bahwa hibah kemudian dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I karena hibah terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa hibah juga termasuk harta bawaan suami atau istri, oleh karenanya suami/istri masing-masing

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, i.c. penghibahan oleh Tergugat I kepada Tergugat II mengenai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu hibah Penggugat, sesuai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura tentang hal tersebut, Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I telah memperoleh bagian, sehingga tanah sengketa bersisa 524 M²;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ad.2, Mahkamah Agung berpendapat hal tersebut tidak perlu diajukan karena sudah cukup dapat dibuktikan dengan akte perceraian (surat bukti P.VI) dan akte-akte lahir kedua anak tersebut (surat bukti P.I a. dan P.I b.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi : Liem Tek Bie alias Wilhemus dan kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Nopember 1985 No.38/Pdt/1985/PT.Jpr., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi :
1. Liem Tek Bie alias Wilhelmus, 2. Liem Heng Tjan alias John Herry tersebut;

— Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Nopember 1985 No.38/Pdt/1985/PT.Jpr.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :
Dalam Eksepsi :

— Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Provisionil :

- Menolak gugatan provisionil dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Juli 1985 No. 37/BA.Pdt.G./1985/PN.Jpr., tidak berharga.
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut;
- Menghukum Termohon kasasi/Penggugat asal membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan baiaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 22 Juli 1987 dengan Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Goenawan, S.H. dan T. Boestomi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu tanggal 9 September 1987 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Goenawan, S.H. dan T. Boestomi, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan Slamet Witresno, S.H. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara :

Ny. Hilda Pontoh, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kompleks Perumahan Murah K.I Kotaraja, sebagai Penggugat, sekarang : **Pembanding**;
melawan :

1. **Liem Tek Bie alias Wilhelmus**, umur : 63 tahun, WNI. pekerjaan tidak ada, tinggal di Jalan A. Yani No. 28 Jayapura, sebagai Tergugat I, sekarang : **Terbanding**;
2. **Liem Heng Tjan alias John Herry**; pekerjaan : Montir Radio, tinggal di Jalan A Yani No. 28 Jayapura; sebagai Tergugat II, sekarang : **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Tentang Duduknya Perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor : 37/Pdt./G/1985/PN.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Provisionil :

- Menyatakan gugatan provisionil dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan benar Penggugat adalah janda Tergugat I dan dua orang anak yaitu : Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur benar anak Penggugat dengan Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menyatakan sita jaminan tanggal 22 Juli 1985 No. 37/B.A.Pdt.G/1985.Jpr. tidak berharga;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga keputusan ini diucapkan berjumlah Rp 22.000,- (duapuluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut akte banding yang dibuat oleh : H. Osman, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jayapura, bahwa pada tanggal 29 Oktober 1985 telah datang menghadap padanya, Ny. Hilda Pontoh bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Murah K.I Kotaraja Jayapura, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, yang menerangkan bahwa ia memohon akan peradilan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985, No. 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam melengkapi permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember, 1985, dan memori banding mana telah diberitahukan pula dengan seksama kepada pihak Tergugat I dan II/Terbanding dengan sempurna pada tanggal 13 Nopember 1985;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat I dan II/Terbanding tidak mengajukan contra memori banding;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh pihak Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut Undang-Undang demikian juga syarat-syarat lain telah dipenuhi maka permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding lewat kuasanya telah mengajukan memori banding oleh Pengadilan Tinggi telah diper-

hatikan dan terlampirkan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi bisa menyetujui sepenuhnya putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai petitum 2, 3, 6, 7, 9, sedangkan petitum ke 4, 5, 8, dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa tanah sengketa menurut hukum beralih kepada pihak Tergugat I mulai tanggal yang tercantum dalam akte hibah yaitu tanggal 11 Mei 1973;

Menimbang, bahwa sedangkan tanggal-tanggal lain yang disebutkan oleh pihak Tergugat-Tergugat sama sekali tidak tercantum dalam akte hibah No.5/1973 terlampir; jadi tidak perlu dipertimbangkan tanggal-tanggal lain;

Menimbang, bahwa dalam tahun 1973 tersebut berarti masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dalam lain perkataan tanah sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa lebih-lebih kalau kita perhatikan saksi-saksi pihak Penggugat/Pembanding yaitu Sdr. Asser Affar dan Sdr. Marthen Maz yaitu Penggugat/Pembandinglah yang mengurus sertifikat tanah sengketa yaitu sertifikat Nomor 60 tahun 1973 karena Tergugat I tidak pandai berbahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa penglubahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah menyalahi prosedur karena hibah untuk orang Tionghoa harus dengan akte notaris (notariële acte) dan tidak sah karena meninggalkan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang ikut berhak;

Menimbang, bahwa berhubung hibah antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah maka harus dinyatakan batal demikian juga sertifikat harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berhubung tanah sengketa bersama bangunannya adalah hasil perjuangan bersama antara Penggugat dan Tergugat I maka sudah selayaknya Penggugat mendapat bagian 2 (dua) pintu bangunan yang terletak dijalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jayapura harus dikuatkan dengan mengadakan perbaikan mengenai beberapa diktumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr, dengan mengadakan perbaikan beberapa diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr;

Dalam Gugatan Provisionil :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr;

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985. Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr. dengan perbaikan mengenai diktumnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan benar Penggugat adalah Janda Tergugat I dan 2 (dua) orang anak yaitu : Liem Hang Pang alias Sjamsul Bachri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur benar anak Penggugat dan Tergugat I;
- Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan 8 (delapan) pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;
- Menyatakan bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demikian juga sertifikat atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakan sah dan menurut hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2 (dua) pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas Jayapura;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos perkara baik di tingkat peradilan pertama maupun di tingkat banding sebesar : Rp 1.900,- (seribu sembilanratus rupiah);
- Menolak petitum gugatan selainnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Kamis, tanggal 28 Nopember 1900 delapan puluh lima, oleh kami : R. Wilarto Margopranoto, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya tanggal 28 Nopember 1985 Nomor 38/Pdt/1985/PT.Jpr. untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : Ny. J.M. Sangadji Luhukay, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Irian Jaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Dalam Ekspedisi :
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr.

Dalam Gugatan Provisional :
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr.

Dalam Pokok Perkara :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 23 Oktober 1985 Nomor 37/Pdt.G/1985/PN.Jpr. dengan pertimbangan sebagai berikut :
Menyatakan benar Penggugat adalah Janda Tergugat I dan II (dua) orang anak yaitu : Iwan Iwan yang alias Siamon, Bachan dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur benar anak Penggugat dan Tergugat I ;
Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan atau dibangun bangunan baru dengan 8 (delapan) pintu adalah hasil pertanahan Penggugat bersama Tergugat I ;
Menyatakan bahwa pertanahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah seputra oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demikian juga sertifikat atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan ;
Menyatakan atas jaminan yang diberikan sah dan menurut hukum ;
Menghukumi Tergugat I untuk menyerahkan 2 (dua) bagian bangunan yang terletak di Jalan A Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas Jayapura ;
Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebesar : Rp 1.000,- (satu seribu rupiah) ;
Menolak petitan gugatan selanjutnya ;

PUTUSAN

No. 37/Pdt./G./1985/PN.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara :

Ny. Hilda Pontoh : pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Murah K.I Kotaraja, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk kedua orang anaknya yang masih kecil, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Agustus 1985, di bawah No.50/1985.Pendaft. ternyata telah memberi kuasa pada keluarganya nama : Peter A.L.O. Ovide, beralamat Jalan Tongkol No. 59 Argapura Jayapura.

melawan :

- I. *Liem Tek Bie* alias *Wilhelmus*; umur 63 tahun, WNI, pekerjaan tidak ada, tinggal di Jalan A. Yani No. 76 Jayapura (Selanjutnya disebut sebagai —Tergugat I).
- II. *Liem Heng Tjan* alias *John Herry*; pekerjaan Montir Radio, tinggal di Jalan A. Yani No. 28 Jayapura (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 25 Juli 1985 No. 48/1985/Pendaft. ternyata Tergugat I dan II telah memberi kuasa pada Saudara *Marajohan Pangabeau, SH*. Pengacara Praktek, beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah mendengar saksi-saksi dan

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Tentang duduknya perkara:

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 1985 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Juli 1985, di bawah No. 37/Pdt./G/1985/PN/Jpr. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1972, Penggugat telah kawin secara Islam dengan Tergugat I dan dalam perkawinan tersebut lahir 2 orang anak kandung masing-masing bernama :
 1. Liem Hang Pang alias Sjamsul Bahri, umur 11 tahun,
 2. Siti Rokaya, umur 7 tahun;Kedua anak tersebut ikut Penggugat;
2. Bahwa karena Tergugat I tidak punya pekerjaan tetap, hanya Penggugat yang mencari nafkah sehingga antara Penggugat dan Tergugat I selalu cekcok, maka pecah perkawinan karena perceraian tanggal 28 Agustus 1984 dan Penggugat keluar dari rumah yang ditempati dengan Tergugat I, pindah ke Perumahan Murah K.I Kotaraja;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1984 Tergugat I datang ke tempat tinggal Penggugat untuk meminta rujuk, Penggugat bersedia asal Tergugat I memberi uang nafkah tapi Tergugat I tidak pernah memberi uang nafkah dan selalu cekcok, sehingga Tergugat I pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama sama Tergugat II sampai sekarang ini;
4. Bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I bertempat tinggal di Jalan A. Yani Jayapura, di atas rumah dan tanah milik seorang Cina Asing yang tahun 1962 melarikan diri ke Hongkong, Tergugat I diberi Kuasa untuk menjaga rumah tersebut;
5. Bahwa Tergugat I hanya memegang Surat Kuasa saja, tidak tahu dan mengalami kesulitan mengurus rumah tersebut, atas usaha dan perjuangan Penggugat sehingga rumah di atas tanah sengketa telah di atas namakan Tergugat I;
6. Bahwa pada waktu Penggugat mengurus dan memperjuangkan rumah dan tanah sengketa, semua pejabat minta agar di atas namakan Penggugat, Penggugat tidak mau karena masih menghormati Tergugat I sebagai suami Penggugat;
7. Bahwa hasil usaha dan perjuangan Penggugat sampai-sampai karena membela dan melindungi harta yang sekarang menjadi sengketa, Penggugat mengalami cacat seumur hidup karena dibacok 4 orang madura di depan Hotel Triton, sekarang ini tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat I karena semua tanah dan rumah tersebut

- telah dihibahkan secara diam-diam kepada Tergugat II, anak Tergugat I dengan istri pertama;
8. Bahwa rumah dan tanah sengketa yang dihibahkan tanggal 10 Pebruari 1984 No.594.4/01/1984 di hadapan Camat Kecamatan Jayapura Utara, sekarang telah disertifikatkan atas nama Tergugat II tanggal 30 Maret 1984;
 9. Bahwa tanah dan rumah yang dihibahkan tersebut luas 524 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan S.U.No. 55/1961;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan S.U.No. 55/1961;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan GS.No.638/1984;
 10. Bahwa sekarang ini rumah yang terletak di atas tanah sengketa telah dibongkar dan dibangun bangunan baru dengan model bangunan bertingkat sebanyak delapan pintu;
 11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan biaya, pada hal semua tanah dan rumah yang dihibahkan kepada Tergugat II adalah hasil perjuangan Penggugat, maka Penggugat sudah sewajarnya untuk menuntut hak Penggugat beserta 2 orang anak kandung Penggugat yang masih kecil berupa 2 pintu dari bangunan yang dibangun Tergugat I dan II, kalau dibayar dengan uang Penggugat minta Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 12. Bahwa oleh karena penghibahan yang dilakukan oleh tergugat I kepada Tergugat II sudah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di mana hibah tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak ahli waris maka hibah tersebut perlu diminta untuk dibatalkan;
 13. Oleh karena selama perkawinan dari bulan Mei 1972 s/d bulan Juli 1985 (13 tahun 2 bulan), Tergugat I tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kalau diberi hanya berupa hutang maka Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jadi 13 tahun 2 bulan adalah 158 bulan x Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini, Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk menyita tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani (di muka toko "Bintang Mas") Jayapura tersebut;
 15. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I

dan II untuk memberikan hanya satu pintu atau uang Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) untuk Penggugat dengan kedua orang anak Penggugat yang masih kecil/di bawah umur, tapi tidak pernah diindahkan.

Permohonan Putusan Provisionil :

16. Bahwa pembongkaran rumah atau bangunan baru di Jalan A/ Yani Jayapura tersebut (di muka Toko Bintang Mas) akan terus berlangsung dengan sewenang-wenang bila tidak segera dihentikan oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan suatu putusan Provisionil;
17. Bahwa putusan Provisionil untuk menghentikan proses pembongkaran rumah atau bangunan baru tersebut juga sangat mendesak (urgen) karena penilaian pembuktian dalam proses gugatan ini perlu ditertibkan dalam keadaan status quo agar satu keputusan dari Pengadilan Negeri tidak berat sebelah dapat terwujud pada akhirnya pemeriksaan/peradilan dalam perkara ini;
18. Bahwa terdapat fakta-fakta pada akhir ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengarahkan tenaga tukang/buruh bangunan dalam jumlah yang relatif besar secara menyolok dengan tujuan untuk mempercepat (mengebut) penyelesaian pembongkaran rumah dan atau pembangunan-pembangunan baru tersebut, sehingga dengan demikian dapat diciptakan satu kenyataan yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Penggugat dan dengan demikian kedudukan tawar menawar dari Tergugat I dan Tergugat II di kemudian hari atas diri Penggugat dapat bersifat memaksakan kehendak sepihaknya secara sewenang-wenang;
19. Bahwa putusan Provisionil yang memutuskan dan menetapkan penghentian setiap kegiatan yang langsung atau tidak langsung yang menyangkut proses dari pelaksanaan dari pembongkaran rumah dan atau bangunan-bangunan baru di atas tanah sengketa tersebut semakin mendesak lagi dan sangat beralasan, mengingat putusan Pengadilan dalam pokok perkara mengenai perihal yang telah terurai di atas sebagaimana tertera di dalam gugatan ini dapat memakan waktu yang relatif lama (berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun);
20. Bahwa putusan Provisionil untuk menghentikan pembongkaran rumah dan atau bangunan-bangunan baru tersebut hanyalah mempunyai arti bila disertai dengan ketetapan uang paksa (dwangsom) yang menghukum setiap pelanggaran atas putusan Provisionil itu

yaitu sebesar Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng di antara para Tergugat;

21. Bahwa surat-surat bukti dalam perkara gugatan ini adalah bukti-bukti otentik berupa surat-surat resmi dari instansi pemerintah sehingga terdapat alasan hukum yang sempurna untuk menyatakan putusan dalam gugatan ini untuk dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini, dengan permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memanggil kedua belah pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan diadili dalam perkara gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dan atau kuasa dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan apapun juga yang langsung atau tidak langsung menurut sifatnya merupakan pelaksanaan lanjutan pembongkaran rumah dan atau bangunan-bangunan baru di atas tanah seluas 524 M2 terletak di Jalan A. Yani Jayapura (di muka Toko Bintang Mas);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah) per hari atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya dalam keputusan ini.

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan putusan Provisionil tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah isteri janda sah dari Tergugat I dan kedua orang anak nama Liem Hang Pang alias Sjamsul Bahri dan Siti Rokaya yang masih di bawah umur adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang sekarang dibongkar dan

- atau dibangun bangunan baru dengan delapan pintu adalah hasil perjuangan Penggugat bersama Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa penghibahan tanah dan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan II dan pensertifikatan tanah atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan perlu dinyatakan batal;
 6. Menyatakan betul bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dari 27 Mei 1972 sampai 15 Juli 1985 Tergugat I tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 7. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas adalah sah menurut hukum;
 8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan pada Penggugat dan 2 orang anaknya yang masih di bawah umur 2 pintu bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Jayapura di muka Toko Bintang Mas, kalau dibayar dengan uang Tergugat I harus membayar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah);
 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang nafkah sebesar Rp 47.400.000,- (empatpuluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara sekaigus;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama membayar uang ongkos semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan. Pengadilan Negeri telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Atas pertanyaan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Tergugat I dan II telah memberikan jawabannya sebagaimana termuat dalam jawabannya tanggal 8 Agustus 1985, yang untuk singkatnya putusan ini dapat disimpulkan :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, karena para pihak dalam perkara ini tidak lengkap.

Penggugat mengetahui bahwa terhadap obyek sengketa telah terjadi perikatan untuk jual beli antara tergugat II dengan Tajuddin Hanitio

dan Tergugat I mempunyai 8 orang anak sebagai ahliwarisnya, namun Penggugat tidak menggugat Sdr. Tajuddin Hanitio dan 7 orang saudara kandung Tergugat II, sebagai yang ikut berhak atas obyek sengketa.

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali tidak bertentangan dengan jawaban Tergugat I dan II.

Bahwa benar penggugat dan Tergugat I telah berkawin secara sah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 1972 dan bercerai pada tanggal 28 Agustus 1984.

Bahwa sebelum kawin dengan Penggugat, Tergugat I sudah pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Juliana Lasut pada tahun 1958, hingga meninggalnya tahun 1971, dan memperoleh 8 orang anak.

Bahwa, obyek sengketa bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, tapi adalah sebahagian dari harta bersama antara Tergugat I dengan istrinya yang pertama Juliana Lasut (almarhumah).

Bahwa sejak saat perkawinan Tergugat I dan istrinya yang pertama Juliana Lasut hingga saat meninggalnya tahun 1971, mengadakan kongsi dagang dengan kakak kandungnya bernama Liem Tek Tjang, dengan membuka toko di atas tanah milik kakaknya itu, yang dikenal dengan sertifikat Rvo. No. 15/1954, seluas 903 M2.

Pada tahun 1961 kakak kandung Tergugat I tersebut kembali ke Hongkong, maka secara lisan diberikanlah tanah dan semua toko yang ada di atasnya kepada Tergugat I. Guna kepentingan balik nama, maka dibuatlah surat kuasa tanggal 31 Desember 1971. Pada tahun 1971 itu juga UUPA No. 5/1960 berlaku di Irian Jaya, maka tanah-tanah dengan hak barat dikonversikan menjadi hak-hak menurut UUPA No. 5/1960 dan untuk itu diperlukan adanya akta hibah, maka dibuatlah akta hibah tanggal 11 Mei 1973, maka lahirlah sertifikat No. 60 atas nama Tergugat I, yang dulunya berasal dari Rvo (Recht van Opstal) tahun 1954.

Dengan demikian jelas sejak tahun 1961, tanah dan bangunan yang ada di atasnya telah menjadi hak Tergugat I bersama istrinya yang pertama Juliana Lasut, adanya surat kuasa penghibahan tanggal 31 Desember 1971 dan akta hibah tanggal 11 Mei 1973, hanya sekedar proses formal agar tanah dan bangunan milik kakak kandung Tergugat I tersebut dapat dibalik nama dan dikonvensikan atas nama Tergugat I, sesuai dengan ketentuan UUPA No. 5/1960, bukan perolehan hak baru.

Bahwa semenjak perkawinan Tergugat I dengan Penggugat, maka tanah dan bangunan tersebut di atas telah berkurang dengan terjualnya tanah dan petak toko no. 40, kemudian penggugat minta dihibahkan lagi pada dua orang anaknya dengan Tergugat I tanah dan petak toko no. 38, yang kemudian telah dijual pula oleh Penggugat.

Sebagai gambaran selama perkawinan dengan Penggugat, Tergugat I telah menghabiskan uang untuk periode 1979 s/d 1984 saja sejumlah Rp 99.117.660,— dengan perincian:

1. harga 1 petak bangunan yang dihibahkan buat 2 orang anak dengan Penggugat, yang dijual oleh Penggugat bernilai Rp 42.500.000,—
 2. harga 1 petak bangunan yang terjual selama perkawinan dengan Penggugat Rp 20.000.000,—
 3. membayar pinjaman Penggugat Rp 16.483.110,—
 4. membayar pinjaman Penggugat pada Chandra .. Rp 705.000,—
 5. membayar pinjaman Penggugat pada Rasyid ... Rp 770.000,—
 6. membayar pinjaman Penggugat pada Ny. Talub . Rp 150.000,—
 7. permintaan Penggugat sewaktu di Jakarta Rp 3.509.110,—
 8. ongkos pengosongan rumah Rp 15.000.000,—
-
- Jumlah Rp 99.117.660,—

Jumlah di atas belum masuk pengeluaran antara tahun 1972 s/d 1978, yang buktinya tidak ada lagi.

Untuk menghindari agar harta pencaharian bersama antara Tergugat I dengan almarhumah istri pertamanya tidak habis terjual, maka dihibahkan tanah dan toko yang tersisa pada Tergugat II salah seorang anak dengan istrinya yang pertama.

Akhirnya Tergugat I dan II mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Selanjutnya terjadilah replik dan duplik, rereplik dan reduplik dan masing-masing pihak telah pula membuat kesimpulan, sebagaimana tercantum dalam replik tanggal 15 - 8 - 1985, rereplik tanggal 21 - 8 - 1985, kesimpulan tanggal 10 - 10 - 1985 dan duplik tanggal 19 - 8 - 1985 reduplik tanggal 24 - 8 - 1985, kesimpulan tanggal 15 - 10 - 1985.

Hal baru yang ditemui dalam kesimpulan Tergugat I dan II menaikkan ketidak wenangan Pengadilan Negeri mengadili gugatan nafkah, sedang selebihnya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

Untuk menguatkan gugatannya oleh penggugat telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. foto copy petikan akta kelahiran Siti Rokaya tanggal 18 - 2 - 1978, (P.I.a);
2. foto copy petikan akta kelahiran Liem Heng Pang tanggal 6 Maret 1974, (P.I.b);
3. foto copy petikan jual beli antara Ny. Helda Pontoh dengan Haji Syahrul tanggal 14 - 11 - 1981 (P.II.);
4. foto copy surat perjanjian sewa beli perumahan murah a, R. Talaleluman tanggal 27 - 1 - 1985, (P.III.);
5. foto copy petikan jual beli antara Ny. Melda Pontoh dengan Haji Syahrul tanggal 14 - 11 - 1981, (P.IV.);
6. foto copy permohonan sertifikat a.n. R. Talaleluman, tahun 1982 (P.V.);
7. foto copy kutipan surat talak antara Liem Tek Bie dengan Helda Pontoh, tanggal 18 Juli 1985. (P.VI.);
8. foto copy kutipan buku nikah sementara antara Liem Tek Bie dengan Helda Pontoh tanggal 16 Juli 1984 (P. VII);
9. foto copy perjanjian pengosongan antara Ny. Helda Pontoh dan haji Tajuddin Hanitio tanggal 10 Juni 1984 (P.VIII);
10. foto copy sertifikat HGB. No. 60 an. Liem Tek Bie (P.IX).

(Kesemuanya surat bukti tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura).

Bukti-bukti surat tersebut oleh pengugat telah pula ditambah dengan bukti saksi;

1. Saksi 1. penggugat nama: Asser Affar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
Bahwa ia adalah pegawai Agraria, bertugas pada bagian pembuatan pemetaan tanah.
Memang benar sekitar tahun 1973, penggugat bersama tergugat I, pernah datang kepadanya saksi, di mana penggugat menanyakan secara lisan bagaimana tata cara mensertifikatkan tanah toko Eng Bo Ho. Waktu itu saya sarankan agar tanah toko Eng Bo Ho itu di atas namakan penggugat saja, karena tergugat I masih WNA. Atas perintah atasan, saya melakukan pengukuran tanah tersebut, yang kebetulan sudah ada patok-patok agrariannya, jadi hanya ukur ulang.

Saya tidak ada lihat surat-surat tanah tersebut, saya hanya bekerja atas perintah dan petunjuk atasan saja.

Atas keterangan saksi ini tergugat I dan II keberatan, karena saksi tidak tahu apa-apa, hanya bekerja atas perintah dan petunjuk, melihat surat-suratpun tidak dan tak bener pada tahun 1973, tergugat I dan II masih WNA.

2. Saksi 2. nama ; Haji Osman di bawah sumpah menerangkan; Bahwa ia berada di Jayapura sejak tahun 1968 dan sejak tahun tersebut di atas tanah terperkara sudah ada toko Eng Bo Ho; Karena waktu itu di Jayapura ini sebagian besar pegawai tidak ada yang bawa istri, maka toko Eng Bo Ho adalah tempat berkumpulnya muda mudi, di sanalah ia berkenalan dengan Penggugat dan Tergugat I dan II.

Toko Eng Bo Ho itu diusahakan oleh Tergugat I dan II dan mereka bertempat tinggal di sana, sedangkan penggugat tinggal di dok V. Memang benar pada tahun yang tak ingat lagi, tapi pada waktu itu yang menjadi Ketua Pengadilan adalah pak Pelo, pernah Penggugat bermaksud menjual tanah tersebut, dan calon pembeli menitipkan uang di Pengadilan Negeri dan saya selaku Panitera atas perintah Ketua Pengadilan menyimpan uang tersebut. Tapi kemudian ternyata jual beli itu tidak jadi, entah apa sebabnya, saya dengar ada masalah, sehingga calon pembeli mengambil uangnya kembali.

Atas keterangan saksi di atas, saksi ini baik Penggugat maupun Tergugat I dan II tidak keberatan, hanya Penggugat mengatakan bahwa waktu itu ia tidak tinggal di dok V, tapi di Abepura.

3. Saksi 3 Penggugat, nama : Marthen Maz di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa pekerjaannya adalah sopir taxi; Memang benar pada tahun 1973, Penggugat pernah memanggilnya minta antarkan ke kantor Bupati, untuk mengurus sertifikat tanah toko Eng Bo Ho katanya. Ada dua atau tidak kali saya mengantar Penggugat ke kantor Bupati, tapi sesudah saya antarkan saya terus pergi. Memang saya ada pernah melihat sertifikat tanah di tangan Penggugat, tapi sertifikat tanah mana saya tidak tahu, saya hanya sebagai sopir taxi hanya mengantarkan saja.

Atas keterangan saksi ini, Penggugat keberatan karena saksi sebenarnya tidak tahu apa-apa, hanya mengantar saja.

4. Saksi 4 Penggugat, nama : Alphius Yarona, di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa memang benar penggugat dan Tergugat I pada tahun yang tidak

ingat lagi pernah datang, Penggugat dan Tergugat I, pernah datang kepadanya menanyakan secara lisan bagaimana tata cara mengurus sertifikat tanah toko Eng Bo Ho. Tapi yang jelas pada tahun 1973 Penggugat dan Tergugat I datang lagi menanyakan hal itu, lalu saya jawab selesaikan dulu kewarganegaraan Tergugat I, baru bisa. Sesudah itu saya tidak tahu lagi. Memang benar pada waktu itu ada diperlihatkan kepada saya surat hibah. Tatkala diperlihatkan surat bukti (T.I.II-8), saksi-saksi ini membenarkannya bahwa surat itulah yang diperlihatkannya kepadanya.

Atas keterangan saksi ini Penggugat keberatan, dengan mengatakan bahwa tidak benar Penggugat yang urus sertifikat tanah tersebut, karena sertifikat atas nama Tergugat I, tentu Tergugat I lah yang urus.

Bahwa untuk menguatkan eksepsi dan bantahannya oleh Tergugat I dan II telah diajukan kontra bukti yaitu :

1. foto copy akta van huwelijk No. 4/1958 tanggal 15 - 11 - 1958 yaitu akta perkawinan antara Tergugat I dengan istri pertamanya Juliana Lasut. (T.I.II-1).
 2. foto copy perjanjian pengosongan antara Ny. Helda Pontoh dengan Tajuddin Hanitio tanggal 10 Juni 1984 (T.I.II-3).
 3. foto copy penetapan ketua Pengadilan Negeri Jayapura tentang kewarganegaraan Tergugat I tanggal 31 - 7 - 1972 (T.I.II-2).
 4. foto copy sertifikat HGB No. 60 an Tergugat I (T.I.II-4).
 5. foto copy sertifikat HGB an Tergugat II No. 542 (T.I.II-5).
 6. foto copy akta hibah tanggal 10 - 2 - 1984 antara Tergugat I dengan Tergugat II (T.I.II-6).
 7. foto copy akta hibah tanggal 24 - 3 - 1981 antara Tergugat I dengan Penggugat (T.I.II-7).
 8. foto copy surat kuasa hibah dari Liem Tek Tjan kepada Thio Kie Tjoan atas tanah terperkara kepada Tergugat I berikut akta hibahnya antara Tio Kie Tjoan kepada Tergugat I tanggal 11 Mei 1973 (T.I.II-8).
 9. foto copy berbagai kwitansi yang diberi tanda (T.I.II-9/13, T.I.II-10/21, T.I.II-11/16, T.I.II-12/8, T.I.II-13/5, T.I.II-14/6).
- Kesemuanya surat bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura.

Di samping surat-surat bukti tersebut oleh Tergugat I dan II telah pula diajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, Tergugat I dan II bernama : Notal Ubun, di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa ia berada di Jayapura sejak tahun 1940, sekarang ia adalah Pur-nawirawan POLRI, kenal dengan Tergugat, tahun 1971.

Pada tahun 1971 itu ia selaku polisi bertugas di bagian seksi Ekonomi, mendapat perintah untuk mengadakan penertiban Ekonomi di Irian Jaya, dengan cara mendaftarkan semua toko-toko berikut dengan pemilikinya, agar dapat diketahui segala kegiatannya. Berdasarkan perintah itu saksi mendaftarkan semua toko dan pemiliknya, pada saat itulah ia berkenalan dengan Tergugat I dan II, di mana toko Eng Bo Ho yang terletak di atas tanah terperkara, terdaftar sebagai pemiliknya adalah Tergugat I. Dan menurut kenyataannya memang Tergugat I lah yang berada dan berusaha di toko tersebut. Sedang Penggugat pada waktu itu berjualan kue-kue kecil di pinggir jalan.

Penggugat keberatan atas keterangan saksi ini, karena saksi hanya mendaftarkan saja.

2. Saksi 2, Tergugat I dan II, nama : Daniel Tomey, di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa ia berada di Jayapura sejak tahun 1953. Pada tahun 1955 s/d tahun 1966, ia bekerja pada Tergugat I dan II, kemudian baru ia menjadi pegawai DPU TK II Kabupaten Jayapura.

Bahwa di atas tanah terperkara ini, dulunya berdiri 6 petak toko yang dikenal dengan toko Eng Bo Ho, di mana dua beradik kakak berusaha kongsi dagang yaitu Liem Tek Tjan dan Liem Tek Bie, saya pada mulanya bekerja sebagai pelayan toko, melayani pembeli-pembeli, kemudian diangkat menjadi sekretaris.

Pada tahun 1961, kami semua pegawai toko Eng Bo Ho, dikumpulkan oleh Liem Tek Tjan, kemudian ia berkata: saya akan pulang ke Hongkong, semua toko-toko ini dan surat-surat telah saya serahkan kepada Liem Tek Bie dan sejak saat itu semua surat-surat jangan lagi dibuat atas nama saya, tapi atas nama Liem Tek Bie. Semuanya harus bekerja baik-baik, patuhi segala perintah Liem Tek Bie. Jangan khawatir, karena antara Liem Tek Bie dan saya, sama saja. Maka sejak saat itu, segala surat menyurat dan segala kegiatan toko Eng Bo Ho, memakai nama Liem Tek Bie. Mengenai penyerahan sertifikat tanah toko tersebut saya tidak tahu, tapi semua pegawai toko Eng Bo Ho pada waktu itu hadir semua, tapi sudah mati semua, kecuali ada satu orang yang masih hidup, sekarang kerja di Kantor Telepon.

Penggugat hanya menyatakan kebenaran atas keterangan saksi;

3. Saksi 3, Tergugat I dan II, nama : Simon Usen, di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa ia mengenal Penggugat dan Tergugat I dan II. Saya kenal dengan Penggugat karena sejak tahun 1970, Penggugat tinggal bersama saya; Sewaktu tinggal dengan saya Penggugat berjualan kue kecil-kecilan di pinggir jalan. Kemudian pada tahun 1972, Penggugat kawin dengan Tergugat I. Yang mengawinkan Penggugat dengan Tergugat I adalah saya. Sejak perkawinan itulah Penggugat pindah dari rumah saya ikut ke tempat Tergugat I di toko Eng Bo Ho yang menjadi sengketa sekarang ini, toko Eng Bo Ho itu sudah ada sejak tahun 1951.

Atas keterangan saksi ini baik Penggugat maupun Tergugat I dan II, tidak merasa keberatan.

4. Saksi 4, Tergugat I dan II, nama : Manuel Maurits Waromi, di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa memang benar pada tahun 1971, sewaktu ia menjadi Ka Sub Agraria Kabupaten dan sekaligus sebagai Kepala Kantor pendaftaran tanah, telah datang kepadanya Liem Tek Bie dan Thio Kie Tjoan kepadanya minta diketahui surat kuasa penghibahan dari Liem Tek Tjan kepada Thio Kie Tjoan atas sebidang tanah dari toko Eng Bo Ho dan memang benar saya menandatangani surat kuasa penghibahan itu. Selanjutnya Liem Tek Bie datang kepada saya mohon agar tanah dan toko Eng Bo Ho itu dibalik nama atas namanya. Permintaan Liem Tek Bie ini belum dapat saya setuju karena akte hibahnya belum dibuat. Saya hanya mengadakan konversi hak menurut hak-hak yang ada dalam UU PA no 5 tahun 1960 dari Rvo menjadi Hak Guna Bangunan dan masih tetap atas nama pemilik asalnya yaitu Lem Tek Tjan. Bahwa tanah dari toko Eng Bo Ho itu telah terdaftar di Kantor Pendaftaran tanah, sejak tahun 1953, dengan status hak Rvo (Recht van Opstal) 1954 dengan luas 903 m² an. Liem Tek Tjan kemudian pada tahun 1973 Liem Tek Bie datang lagi dengan membawa akte hibah, berdasarkan akte hibah itulah Rvo 1954 yang telah dikonversi menjadi HGB. No. 60, dibalik nama atas nama Liem Tek Bie. Tatkala diperlihatkan surat bukti (T.I. II-8), saksi ini membenarkannya bahwa surat kuasa hibah dan akta hibah itulah yang disampaikan kepadanya waktu itu. Ia tidak pernah ketemu dengan Penggugat, sehubungan dengan pengurusan tanah (hak tanah) toko Eng Bo Ho.

Atas keterangan saksi ini Penggugat keberatan, yang menurut Penggugat, ia sering bertemu dengan saksi baik di kantor maupun di rumahnya Penggugat sendiri.

5. Saksi 5, Tergugat I dan II nama : Luther Wo Pari, di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa ia berada di Jayapura sejak tahun 1957, ia mengenal Penggugat karena ia pernah memperbaiki telpon di rumah Penggugat dan ia mengenal Tergugat I dan II, karena Tergugat I dan II bekas majikannya. Dulu sebelum ia bekerja di kantor telepon, ia bekerja pada Tergugat I dan II, sebagai pelayan dalam jual beli di toko Eng Bu Ho, milik Liem Tek Tjan dan Liem Tek Bie, mereka adalah adik kakak, kongsi dagang, dan sama-sama tinggal di toko itu. Pada tahun 1951, semua pegawai di-suruh kumpul oleh Lie Tek Tjan, termasuk saksi sendiri. Pada waktu itu Liem Tek Tjan bilang, bahwa ia akan kembali ke Hongkong, maka sejak saat ini toko ini saya serahkan pada Liem Tek Bie dan semua surat-surat jangan dibuat lagi atas nama saya, tapi atas nama Liem Tek Bie. Semuanya harus bekerja baik-baik, patuhi segala perintah Liem Tek Bie. Jangan ada yang merasa khawatir, antara Liem Tek Bie dengan saya sama saja.

Sejak saat itu semua surat-surat jual beli dibuat atas nama Liem Tek Bie, mengenai penyerahan surat-surat tanah saya tidak tahu, Liem Tek Tjan hanya bilang begitu saja.

Penggugat keberatan atas saksi itu, saksi 5, Tergugat I dan II ini, karena diajukan pada acara kesimpulan, bukan acara pemeriksaan saksi lagi dan keterangan saksi tak ada sangkut pautnya dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I.

Akhirnya para pihak tidak ingin mengemukakan apa-apa lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa segala sesuatunya sebagaimana dengan jelas tertera dalam berita acara persidangan (pemeriksaan), harus dianggap sebagai tercantum dalam putusan ini.

Tentang Hukumannya:

Menimbang bahwa gugatan penggugat tersebut di atas bersifat kumulatif, yang untuk jelasnya dapat disingkat sebagai berikut:

1. Gugatan pembahagian atas harta bersama atas sebidang tanah yang luasnya 524 m², dengan batas-batasnya adalah:

sebelah Utara dengan S.U No. 55/1961;

sebelah Selatan dengan Jalan A. Yani;

sebelah Barat dengan GS No. 638/1984;

sebelah Timur dengan S.U No. 55/1961;

yang di atasnya sedang dibangun toko bertingkat, terletak di Jalan A. Yani muka toko Bintang Mas berupa 2 petak toko atau

kalau diganti dengan uang sejumlah Rp 350.000.000,— dan pembatalan akta hibah tanggal 10 — 2 — 1984 No. 594.4/01/1984 antara Tergugat I dan II atas tanah dan bangunan tersebut di atas.

2. Gugatan provisionil, berupa penghentian proses pembangunan toko bertingkat tersebut, sebelum perkara diputus.
3. Gugatan mengenai uang nafkah sejumlah Rp 300.000,— per bulan selama 13 tahun 2 bulan = Rp 47.400.000,—

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.

Menimbang bahwa gugatan penggugat telah dijawab oleh Tergugat I dan II, di mana Tergugat I dan II telah mengawali jawabannya dengan mengajukan suatu eksepsi, sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat I dan II tanggal 8 — 8 — 1985 dan kesimpulannya tanggal 15 — 10 — 1985, eksepsi mana telah diajukan dalam 2 bentuk yaitu:

1. Para pihak dalam perkara tidak lengkap, karena Sdr. Tadjuddin Hanitio yang ikut berkepentingan sebagai pembeli atas obyek sengketa tidak ikut digugat, di samping tergugat I masih punya 7 orang anak yang ikut berkepentingan atas obyek sengketa, juga tidak ikut digugat. Karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna dan tak dapat diterima.
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat. Karena perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat I, berlangsung secara agama Islam.

Menimbang bahwa suatu eksepsi dapat mengandaskan suatu gugatan, karena itu harus dipertimbangkan lebih dahulu.

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan II, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak lengkap, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bukan keberatan atas jual beli atas tanah dan toko sengketa, tapi keberatan atas penghibahan dari Tergugat I pada Tergugat II dan menuntut pembagiannya; (lihat gugatan Penggugat angka 11.).

Hal ini diperkuat lagi dari surat bukti (P.VIII = T.I.II.3) yaitu akta Notaris no. 21 tentang perjanjian pengosongan antara Ny. Hilda Pontoh (Penggugat) dengan Sdr. Tadjuddin Hanitio. Dari surat bukti

ini pada halaman pertama dan kedua, dapat dilihat bahwa Penggugat menyetujui jual beli tersebut dan lebih tegas bila dibaca pasal 4 nya alenia terakhir yang berbunyi "pihak pertama (penggugat) dengan ini berjanji bahwa dengan diterimanya uang pengosongan tersebut, maka pihak pertama (penggugat) tidak akan mengganggu pelaksanaan pembangunan gedung/toko tersebut sampai selesai seluruhnya, karena pihak kedua (Tajuddin Hanitio) dibebaskan oleh pihak pertama (Penggugat) dari segala tuntutan hal-hal tersebut di atas"

Sebagai suatu perjanjian yang sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 BW). Penggugat terikat dengan Akte Notaris No. 21 ini, karena itu memang tidak ada dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugatnya. Andaikata benar obyek sengketa adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah istri pertamanya Yuliana Lasut (ibu kandung dari 8 anak) masih perlu dibuktikan, toh Tergugat I selaku ayah masih hidup, sehingga obyek sengketa masih tetap di bawah kekuasaan Tergugat I sepanjang harta bersama itu belum dibagi-bagi.

Tidak ada bukti obyek sengketa telah diberikan pada 7 orang anak lainnya, kecuali hibah kepada Tergugat II.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengikot sertakan 7 orang anak Tergugat I dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dan II mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili gugatan uang nafkah, walaupun eksepsi diajukan dalam acara kesimpulan, tetap dapat diterima karena eksepsi ini mengenai kewenangan yang bersifat absolut (kompetensi absolut), suatu eksepsi yang dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan, bahkan karena jabatan Pengadilan dapat mengatakan tidak berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti (P.VI dan P.VII) yaitu surat nikah dan talaq antara Tergugat I dan Penggugat, maka terbukti memang benar Penggugat dan Tergugat I telah berkawin secara Islam dan bercreai secara Islam.

Gugatan nafkah bagi orang-orang yang beragama Islam, tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya dan Pengadilan

Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat.

Dalam Gugatan Provisionil :

Menimbang bahwa mengenai gugatan provisionil dari Penggugat berupa penghentian proses pembangunan toko bertingkat di atas tanah terperkara, menjelang perkara diputuskan, Pengadilan Negeri sengaja sangat berhati-hati dalam hal ini, karena suatu kecerobohan dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain yang sulit untuk diperbaiki.

Menimbang bahwa sebagaimana telah disinggung sewaktu menanggapi eksepsi Tergugat I dan II, maka dalam gugatan provisionil ini akan terulang kembali.

Berdasarkan surat bukti (P.VII = T.III-3) yaitu akta notaris No. 21 jelas terbukti bahwa Penggugat mengetahui dan menyetujui jual beli dan pembangunan toko bertingkat oleh Sdr. Tajuddin Hanitio dan dalam pasal 4 alenia terakhir perjanjian akta notaris itu, Penggugat telah berjanji untuk tidak mengganggu gugat proses pembangunan gedung/toko bertingkat hingga selesai.

Sebagai suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, maka Penggugat terikat dengan janjinya itu untuk tetap mematuminya, sebagai ketentuan undang-undang;

Mengabulkan gugatan provisionil ini, sama artinya sekongkol melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan provisionil ini, tanpa dasar dan alasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa bila diperhatikan jawab menjawab kedua belah pihak tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan adalah;

”Penggugat berpendapat bahwa tanah dan toko terperkara adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat I, sedang sebaliknya Tergugat I dan II berpendapat bahwa tanah dan toko terperkara adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah istri pertamanya Yuliana Lasut”.

Menimbang bahwa oleh karena itu perlu diketahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta pencaharian bersama.

Menimbang bahwa karena gugatan ini diajukan setelah berlakunya UU. No. 1 tahun 1974 secara efektif maka akan berlakulah segala ketentuan dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Menimbang bahwa perlu digaris bawahi kata "diperoleh" karena sangat rapat hubungannya dengan tata cara perolehan hak. Ada dua cara perolehan sesuatu hak atas tanah yaitu :

1. secara orisinil;
2. secara pemindahan hak;

Berdasarkan tata cara perolehan hak ini barulah seseorang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bukti hak yang disebut dengan sertifikat. Dengan demikian jelaslah bahwa sertifikat bukanlah bukti perolehan hak, tapi hanyalah salah satu bukti hak. Hal ini perlu dipahami benar-benar bahwa antara "perolehan hak" dengan "bukti hak", dua hal yang berlainan.

Misal; sebidang tanah dibeli tahun 1982, maka surat jual beli itu adalah dasar perolehan hak, tapi mungkin sertifikat sebagai bukti hak, baru diperoleh tahun 1985. Hal ini tidak berarti bahwa pada tahun 1982 itu hak atas tanah itu belum ada. Hak atas tanah itu telah ada, tapi bukti hanya berupa sertifikat baru pada tahun 1985.

Menimbang bahwa dengan berpegangan pada pengertian di atas, maka dalam perkara ini perlu dipertanyakan, kapan tanah terperkara diperoleh oleh Tergugat I ? Apakah dalam kurun waktu 1958 s/d April 1971, yaitu masa perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumah istri pertamanya Yuliana Lasut, sebagai terbukti dari surat bukti (T.II-1) akte van huwelijk antara Tergugat I dengan Yuliana Lasut, atau dalam kurun waktu Mei 1972 s/d Agustus 1984 masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana terbukti dari surat bukti (P.VI dan P.VII) akta nikah dan akta cerai antara Penggugat dan Tergugat I. Hal inilah yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya oleh Penggugat telah diajukan surat-surat bukti (P.I s/d P.IX) dan 4 orang saksi sebaliknya Tergugat I dan II untuk membuktikan bantahannya telah diajukan kontra bukti berupa bukti surat (T.II-1 s/d T.II-14) dan 5 orang saksi.

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak, maka Pengadilan Negeri menemui kenyataan

an tentang riwayat tanah terperkara sebagai berikut;

1. Pada tanggal 13 Oktober 1953, tanah terperkara telah terdaftar dikantor pendaftaran tanah Kabupaten Jayapura dengan surat ukur No. 58/1953, luas 903 m².
2. Pada tanggal 30 Januari 1954 memperoleh status hak Rvo No. 15/1954 tercatat atas nama Liem Tek Tjan.
(Vide; surat bukti P. IX = I.I.II-4 dan keterangan saksi 4 tergugat I dan II).

2. Bahwa pemilik tanah tersebut Liem Tek Tjan beradik kakak dengan tergugat I (Liem Tek Bie) dimana mereka mengadakan usaha bersama, dengan membangun 6 buah/petak toko diatas tanah tersebut yang dikenal dengan petak No; 30, 32, 34, 38, 40, dengan nama toko Eng Bo Ho dan di sanalah dua beradik kakak ini bertempat tinggal. (Vide Keterangan saksi 2 penggugat, saksi 1, 2, 3, dan 5 tergugat I dan II).

3. Pada tahun 1958 tergugat I kawin dengan Yuliana Lasut sampai hayatnya tahun 1971 (Vide surat bukti T. I. II-2).

4. Pada tahun 1961, Liem Tek Tjan menyerahkan toko-toko, berikut dengan segala surat-suratnya kepada Liem Tek Bie (tergugat I).

Penyerahan mana dilakukan oleh Liem Tek Tjan, dihadapan seluruh pegawai toko Eng Bo Ho, yang sengaja ia kumpulkan, sehubungan dengan rencananya akan kembali ke Hong Kong tahun 1961, tapi rencananya itu baru terlaksana pada tahun 1971, tapi sejak tahun 1961 itu, segala surat-surat dan kegiatan toko Eng Bo Ho sudah atas nama Liem Tek Bie, atas kehendak Liem Tek Tjan sendiri.

(Vide, keterangan saksi 1, 2, 5 dan pengakuan tergugat I dan II).

5. Pada tahun 1980, diadakan pepera (referendum) di Irian Jaya (dulu Irian Barat), dimana rakyat Irian Jaya mengintegrasikan diri kewilayah Republik Indonesia Kesatuan.

Dengan keputusan Presiden No; 7 tahun 1971, diperlukan UU No. 3 tahun 1948 di Irian Jaya, tentang kesempatan bagi warganegara asing menjadi warga negara Indonesia. Pada tahun 1971, diperlakukan pula UUPA No. 5 tahun 1980.

Secara formal adalah demikian, tapi prakteknya memperlakukan suatu undang-undang dalam situasi yang demikian, jelas akan memakan waktu.

saksi yang diajukan penggugat, yang dapat membuktikan bahwa tanah terperkara diperoleh selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat I. Ikut mengurus lahir suatu sertifikat, sebagaimana yang penggugat katakan dalam gugatannya, bukan tatacara perolehan suatu hak. Tidak mungkin suatu sertifikat dapat lahir, sebelum ada perolehan hak lebih dahulu.

Bahkan sebaliknya tergugat I dan II membuktikan bantahannya telah berhasil, bahwa ia sejak tahun 1953 telah bertempat tinggal di atas tanah terperkara bersama kakaknya Liem Tek Tjan, kemudian memperoleh penyerahan/hibah dari kakaknya tersebut pada tahun 1961 sehubungan akan kembalinya kakaknya tersebut ke Hong Kong. Dengan kata lain perolehan hak atas tanah HGB No. 60 dimana tanah terperkara adalah sebahagian dari sisa tanah tersebut terjadi berdasarkan peralihan hak, dengan diserahkannya/dihibahkan oleh Liem Tek Tjan tanah Rvo. 15/1954 kepada tergugat I (Liem Tek Bie) pada tahun 1961, jauh sebelum tergugat I kawin dengan penggugat, yang baru terjadi pada tahun 1972.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dibuktikan bahwa tergugat I kawin dengan almarhum Yuliana Lasut pada tahun 1958, sampai dengan akhir hayatnya tahun 1971. Sedang tanah dan toko sebagaimana tersebut dalam Rvo 15/1954 yo HGS No. 60 diperoleh oleh tergugat I tahun 1961, maka jelaslah tanah tersebut diperoleh oleh tergugat I selama perkawinannya dengan almarhumah Yuliana Lasut. Menimbang bahwa tanah yang tersebut dalam HGB 545 seluas 524 m² yang telah dihibahkan oleh tergugat I pada tergugat II yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah bahagian dari tanah yang tersebut dalam Rvo No. 15/1954 yo No. 60 tersebut diatas, setelah terjualnya toko petak no. 40 dan no. 38 selama tergugat I kawin dengan penggugat. Oleh karena itu tanah terperkara sekarang ini, adalah harta bersama antara tergugat I dengan almarhumah Yuliana Lasut.

Menimbang bahwa lahirnya akta kuasa hibah tgl. 31 Desember 1971 antara Liem Tek Tjan dengan Thio Kie Tjoan, yang isinya agar Thio Kie Tjoan, membuat akta hibah atas tanah tersebut dalam Rvo No. 15/1954 kepada Liem Tek Bie (tergugat I), semakin memperkuat keterangan saksi 2 dan 5, tergugat I dan II bahwa memang benar Liem Tek Tjan telah menyerahkan tanah tersebut pada tergugat I yang dilakukan secara lisan pada tahun 1961.

Karena itu tidak benar kalau penggugat mengatakan bahwa tergugat

I hanya memegang surat kuasa saja. Disamping memperkuat tentang diteruskannya tanah tersebut dalam Rvo No. 15/1954 pada tahun 1961, juga surat kuasa hibah itu dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan formal, sehubungan dengan berlakunya UUPA No. 6 tahun 1980 di Irian Jaya. Karena konversi hak dan balik nama tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan penyerahan secara lisan pada tahun 1961 itu.

Menimbang, bahwa karena putusnya perkawinan antara tergugat I dengan Yuliana Lasut, akibat matinya Yuliana Lasut, seharusnya harta bersama tersebut pada saat perkawinan antara penggugat dengan tergugat I sudah terbagi dua, agar hak hak anak tergugat I dengan almarhumah Yuliana Lasut tidak dirugikan akibat perkawinan kedua itu. Artinya $1/2 \times 903 \text{ m}^2$ adalah bahagian dari anak almarhumah Yuliana Lasut, sebagai ahli waris dari ibunya. Sedang $1/2 \times 903 \text{ m}^2 = 406 \text{ m}^2$ adalah harta bawaan tergugat I dalam perkawinannya dengan penggugat.

Menimbang bahwa ternyata selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat I separuh dari harta bersama antara tergugat I dengan almarhumah Yuliana telah habis terjual, berarti harta bawaan tergugat I telah habis. Sehingga sisa tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah bahagian almarhumah Yuliana Lasut yang diwarisi oleh anak-anaknya.

Menimbang, bahwa andaikata pun sisa tanah yang masih ada itu tetap dianggap sebagai harta bawaan tergugat I, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 UU No 1/1974, tergugat I berhak sepenuhnya untuk mengambil tindakan hukum atas tanah terperkara, sebagai harta bawaan.

Dengan demikian tidak ada alasan sama sekali bagi penggugat untuk menyatakan keberatannya atas penghibahan oleh tergugat I kepada tergugat II.

Menimbang bahwa tentang adanya unsur asing, seperti yang disinggung penggugat, perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya UUPA No. 5/1960 di Irian Jaya masih berlaku ketentuan dalam pasal 1. B.W. Dan hal itu tidak pula akan menyebabkan tanah terperkara menjadi harta bersama. Pada tahun 1972 tergugat I telah menjadi warga negara, karena itu balik nama yang dilakukan pada tahun 1973 adalah syah.

Menimbang bahwa karena penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah terperkara adalah harta bersama, maka gugatan penggugat haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penyitaan jaminan tgl. 22 Juli 1985 No. 37/BA. Pdt.G/1985. PN. JPR, ternyata atas obyek sengketa telah dilakukan penyitaan jaminan. Dengan ditolakny gugatan penggugat ini, maka penyitaan jaminan yang telah dilakukan itu harus dinyatakan tidak berharga.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan penggugat pada petitum angka. 3 gugatan yang memohon agar dinyatakan sebagai isteri janda yang sah dari tergugat I, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut; Bahwa untuk menyatakan sah tidaknya penggugat sebagai janda tergugat I, tergantung pada sah tidaknya perceraian, hal ini sepenuhnya adalah wewenang Pengadilan Agama, karena penggugat dan tergugat I berkawin secara Islam dan bercerai secara Islam. Penggugat telah punya bukti autentik untuk itu, yang tak mungkin ditukar/diganti dengan penetapan/putusan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri berdasarkan bukti otentik itu, hanya dapat menyatakan bahwa penggugat benar adalah janda tergugat I.

Demikian pula dengan permohonan penggugat agar 2 orang anak nama, Liem Hang-Pang alias Syamsul Bahri dan Siti Rokayah dinyatakan sebagai anak yang sah dari penggugat dan tergugat I, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Pasal 55 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi;

"Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang".

Ayat (2) pasal ini hanya memberi wewenang pada Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan, apabila akte tersebut tidak ada. Kedua anak tersebut, telah mempunyai akte autentik tersebut, yang tak mungkin diganti dengan penetapan Pengadilan Negeri. Berdasarkan akte autentik itu, Pengadilan Negeri hanya dapat menyatakan bahwa memang benar kedua anak tersebut adalah anak dari penggugat dan tergugat I.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian.

Menimbang, bahwa karena dalam pokok perkara, Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 192 yo pasal 273 Rbg, biaya perkara haruslah dibebankan pada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Mengingat bahwa Pasal undang-undang yang berkenaan dengan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili gugatan nafkah dari Penggugat;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, dan II, selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Provisionil:

- Menyatakan gugatan provisionil dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebahagian;
- Menyatakan benar Penggugat adalah janda Tergugat I. dan Dua orang anak yaitu: Liem Hang Pang alias Syamsul Bahri dan Siti Rokayah yang masih di bawah umur, benar anak Penggugat dengan Tergugat I.;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menyatakan Sita Jaminan tanggal 22 Juli 1985 No. 37/B.A.Pdt.G/1985. PN. JPR. tidak berharga.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga keputusan ini diucapkan berjumlah Rp. 22.000,- (duapuluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 1985 dalam suatu ruangan permusyawaratan majelis, dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1985 keputusan tersebut diucapkan dalam ruangan persidangan yang terbuka untuk umum oleh: Ibnu Faruck, SH. selaku Hakim Ketua, Soehardoko, SH. dan Sukadi masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Marsudiharto Panitera Pengganti dan Kedua belah pihak yang berperkara.